



# PEMERINTAH KOTA SERANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Jenderal Sudirman Perumahan Highland Park, Banjar Agung, Cipocok  
Jaya, Serang, Banten 42122

Tlp : (0254) 201108, 201117 Faksimile (0254) 202810

Laman : [www.setda.serangkota.go.id](http://www.setda.serangkota.go.id) Pos el : [setdakepegawaian@gmail.com](mailto:setdakepegawaian@gmail.com)

---

## ANALISIS/EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### ANALISIS/EVALUASI IMPLEMENTASI ATAU PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

#### A. LATAR BELAKANG

Peraturan Wali Kota merupakan instrumen hukum sebagai tindak lanjut atau peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah. Dalam melaksanakan ketentuan peraturan daerah diperlukan regulasi sebagai peraturan pelaksanaan agar perda yang telah diundangkan dapat berjalan dengan optimal. Banyaknya peraturan pelaksanaan yang belum dibentuk menjadi catatan tersendiri dalam evaluasi kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana perda dalam menyusun regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, program, dan/atau kegiatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menegaskan bahwa Kepala daerah menetapkan Perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini peraturan daerah mengamanatkan untuk membentuk perkada.

Peraturan Wali Kota sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah banyak yang belum dibentuk, hal ini menjadi permasalahan dalam pelaksanaan atau implementasi peraturan daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menegaskan Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada dan disampaikan ke bagian hukum untuk dilakukan pembahasan.

Tim telah melakukan evaluasi terhadap implementasi peraturan daerah dari sisi regulasi atau peraturan pelaksanaan peraturan daerah.

## B. DASAR HUKUM

Dasar hukum analisis/evaluasi Implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## C. ANALISIS ATAU EVALUASI

1. Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberian Nama-nama Jalan di Wilayah Kota Serang;
- Peraturan Daerah yang belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yaitu:



1. Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberian Nama-nama Jalan di Wilayah Kota Serang;
2. Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan
3. Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
4. Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
5. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga
6. Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan
7. Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru lahir, Bayi dan Anak
8. Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
9. Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020 – 2040
10. Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Drainase Perkotaan
11. Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
12. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal
13. Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
14. Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya
15. Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah
16. Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
18. Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
19. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut kesimpulan hasil analisis/evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi peraturan daerah yaitu:

1. Peraturan Daerah yang belum dilengkapi peraturan wali kota.

No	Judul Perda	Perangkat Daerah
1.	Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberian Nama-nama Jalan di Wilayah Kota Serang	Dinas Perhubungan

2.	Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga
3.	Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5.	Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
6.	Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru lahir, Bayi dan Anak	Dinas Kesehatan
8.	Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Satuan Polisi Pamong Praja
9.	Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020–2040	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.	Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Dinas Sosial
12.	Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal	Dinas Perhubungan
13.	Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
14.	Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15.	Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
16.	Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
17.	Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi Setda Kota Serang
18.	Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja (Bidang Pemadam Kebakaran)
19.	Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terkait Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah : 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;



		5. Dinas Perhubungan; 6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Penyesuaian Perwal. 8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 9. Badan pendapatan Daerah; 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
--	--	--

Saran yang dapat kami sampaikan yaitu :

1. Bapak Wali Kota agar menyampaikan surat kepada Kepala perangkat daerah untuk menyusun rancangan peraturan wali kota sesuai bidang tugasnya.
2. Usulan rancangan peraturan wali kota disampaikan ke Bagian Hukum untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Wali Kota tahun 2025.

Demikian analisis atau evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi peraturan daerah Kota Serang yang dapat disusun sebagai data pendukung dalam proses penyusunan program pembentukan peraturan perundang-undangan dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah di Kota Serang.

Serang, 10 September 2024

Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan  
Perundang-undangan



Drs. Subagyo M.Si  
Pembina Tingkat I-IV/b  
NIP 197409101993031002